

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia yang saling bersentuhan, bergesekan, dan bertukar pikiran adalah dilatarbelakangi oleh kemajuan arus teknologi dan informasi. Dalam arti lain dapat disebut sebagai mudahnya manusia menjangkau luas dan batas teritorial dimana zaman dahulu menjadi penghambat atau belum didukung oleh kemajuan peradaban. Kultur masyarakat menjadi kultur homogen, terjadi persilangan kebudayaan di masyarakat semacam kebudayaan hybrid, percampuran dari berbagai macam kebudayaan yang tidak jelas mana batas-batasnya (Usman & Qodir, 2014).

Menurut Munip (2012) pengaruh globalisasi mendorong manusia untuk saling mempengaruhi satu sama lain salah satunya melalui pemahaman yang ekstrim. Radikalisme menjadi contoh eksis yang secara umum adalah mengadopsi budaya timur tengah, tentu dengan perbedaan karakteristik antar wilayah. Indonesia yang wilayahnya dihuni oleh mayoritas muslim, pada akhirnya juga mendapat pengaruh signifikan yang dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat menempuh pendidikan di timur tengah. Derasnya arus dan antusiasme masyarakat dalam mendalami ajaran agama ke pusat atau inti peradaban islam di timur tengah tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi juga memunculkan permasalahan baru seperti pemahaman ekstrim yang merugikan orang lain (Radikalisme).

Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki artian sebagai suatu paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan dalam politik. Atau suatu paham yang menginginkan pembaharuan sosial politik dengan cara keras (drastis). Jika diartikan lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu prinsip (sikap) bagi orang yang meyakini, lalu kemudian berusaha untuk memberi tekanan atau pengaruh sosial-politik. Jadi wajar saja ketika gerakan radikalisme akan berhadapan langsung dengan lembaga pemerintahan, karena persoalan sosial hingga politik secara penuh berada di dalam kendali kekuasaan (pemerintah).

Selama ini berbagai upaya pemerintah dalam menangani radikalisme salah satunya adalah melalui peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola penanganan yang kerap dihadirkan di hadapan publik adalah dengan cara komunikasi melalui seminar aktif. Seminar yang dilakukan merupakan wujud dari sikap kontra terhadap radikalisme, dengan sasaran utama seperti Mahasiswa, Pelajar, Santri, Masyarakat, Ormas, LSM, maupun kepada aparat pemerintah sendiri. Seminar dapat diartikan sebagai pola penanganan berwujud

komunikasi, sifatnya adalah mencegah (preventif) sebelum adanya orang/kelompok yang terpapar radikalisme.

Pola Penanganan Radikalisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan manifestasi dari agenda besar pemerintah dalam menjamin terciptanya situasi keamanan dan ketertiban negara. Implementasi peraturan pelaksana yang diwujudkan oleh pemerintah adalah melalui UU No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengandalkan kinerja aparat kepolisian di seluruh daerah. Kepolisian bertindak sebagai garda pelaksana fungsi pemerintahan meliputi kegiatan pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemeliharaan keamanan nasional.

Kepolisian di berbagai daerah (tingkat Polda) memiliki divisi bernama Direktorat Intelijen Keamanan yang juga menaruh fokus pada isu radikalisme secara kontinyu. Beberapa tugas besar dari Direktorat Intelijen Keamanan adalah menyelenggarakan, mengumpulkan, mengolah data, mendokumentasikan, maupun menganalisis perkembangan ancaman terhadap lingkungan sasaran sebagai peringatan dini (early warning). Serangkaian kegiatan Intelijen tersebut merupakan upaya tersembunyi (intelijen), namun hasilnya akan disajikan sebagai basis informasi bagi publik.

1.2 Tujuan

Poster informatif yang telah penulis buat disini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana Pola Penanganan Radikalisme yang selama ini dilakukan oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia.

Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai *agent social of change* dapat merespon segala situasi dan kondisi yang berada di lingkungan sekitar, serta tidak mudah untuk terpengaruh terutama dengan isu seputar radikalisme, pemberontakan, hasutan, atau pun indikasi terhadap adanya paham menyimpang pada diri orang lain.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui berbagai macam upaya kepolisian sehingga timbul hubungan koordinasi dan kooperatif jika sewaktu-waktu mendapati marabahaya atau adanya indikasi ancaman di lingkup masyarakat.

3. Bagi Dosen dan Akademisi

Dosen maupun kalangan akademisi di seluruh Indonesia dapat mengembangkan isu radikalisme menjadi sebuah penelitian lebih lanjut, sehingga sifatnya selalu berkembang dan informatif bagi kalangan umum terutama masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

DESKRIPSI

Poster Informatif

Poster Informatif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mendeskripsikan tentang pola penanganan radikalisme oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan sekaligus perpanjangan tangan bagi pemerintah pusat untuk menciptakan rasa aman, adil, dan tentram dalam lingkup kehidupan masyarakat. Poster dibuat dengan design sederhana tanpa mengurangi pesan atau makna yang hendak disampaikan oleh penulis, di sisi lain untuk memudahkan terciptanya pemahaman masyarakat maupun seluruh pembaca lainnya.

Poster dibuat dalam bentuk luaran (cetakan) kertas 1 lembar, sehingga sifatnya mudah untuk dibawa maupun ditempelkan di berbagai tempat tanpa menghabiskan banyak ruang. Seluruh informasi di dalam poster bersifat tertulis dan disertai dengan bagan, gambar, logo bendera Indonesia, serta warna terang, tajam, maupun gelap pada gaya tulisan dan border bagan.

Di dalam poster juga memuat tentang informasi penting perihal sasaran dan target yang sangat rentan untuk terpengaruh dengan paham ekstrim seperti Mahasiswa, Masyarakat, LSM, Aparatur Sipil Pemerintah, Siswa, dan Santri. Maka dari itu poster dicetak dalam bentuk sesederhana mungkin demi kemudahan akses atau pun penerapannya di lapangan.

Segi Pandang Teori

Aspek teoritis yang terkandung dalam poster informatif radikalisme adalah sebagaimana definisi Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “suatu paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan dalam politik. Atau suatu paham yang menginginkan pembaharuan sosial politik dengan cara keras (drastis). Jika diartikan lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu prinsip (sikap) bagi orang yang meyakini, lalu kemudian berusaha untuk memberi tekanan atau pengaruh sosial-politik. Jadi wajar saja ketika gerakan radikalisme akan berhadapan langsung dengan lembaga pemerintahan, karena persoalan sosial hingga politik secara penuh berada di dalam kendali kekuasaan (pemerintah).

Acuan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menunjukkan kepedulian pemerintah nasional dengan mengandalkan kinerja aparat kepolisian di seluruh daerah. Kepolisian bertindak sebagai garda pelaksana fungsi pemerintahan meliputi kegiatan pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemeliharaan keamanan nasional.

Aspek sosialisasi dan edukasi:

- Mahasiswa, santri, masyarakat, aparatur pemerintah, LSM, dsb semakin mengetahui tugas dan fungsi dari aparat kepolisian.
- Terbentuk koordinasi antar elemen.
- Terbentuk lingkungan dan zona aman apabila saling menguatkan satu sama lain.

Kelebihan

- a. Tampilan sederhana dan mudah dipahami, namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting
- b. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warnanya.
- c. Dapat disebarluaskan dengan mudah ke seluruh elemen masyarakat baik secara langsung maupun berupa bentuk digital (penyebaran melalui medsos).
- d. Apabila masyarakat banyak yang menyebarkan melalui pesan berantai di medsos, maka baik pemerintah maupun kepolisian dapat lebih menekan biaya cetak sehingga dapat dialihkan ke hal-hal lain yang lebih mendesak.

Keterbatasan

- a. Keterbatasan dari poster informatif radikalisme adalah terkait dengan kemungkinan kesalahpahaman bagi orang-orang tertentu, dimana berpotensi untuk tersinggung apabila tidak ada sosialisasi lanjutan dari pihak kepolisian di seluruh daerah
- b. Apabila hanya dicetak dengan kertas biasa tanpa diberi pelindung tambahan seperti misalnya laminating dan sebagainya, maka akan mudah robek, luntur, maupun basah ketika ditempel di tempat-tempat umum atau ruang terbuka.

Nilai Jual

Nilai jual dalam poster informatif radikalisme tidak dapat diorientasikan ke dalam *profit-oriented* atau dengan kata lain bernilai bisnis (meraup keuntungan). Akan tetapi nilai jualnya terletak pada esensi sosialisasi serta edukasi yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir SDM masyarakat, mahasiswa, siswa, santri, dan lain sebagainya.

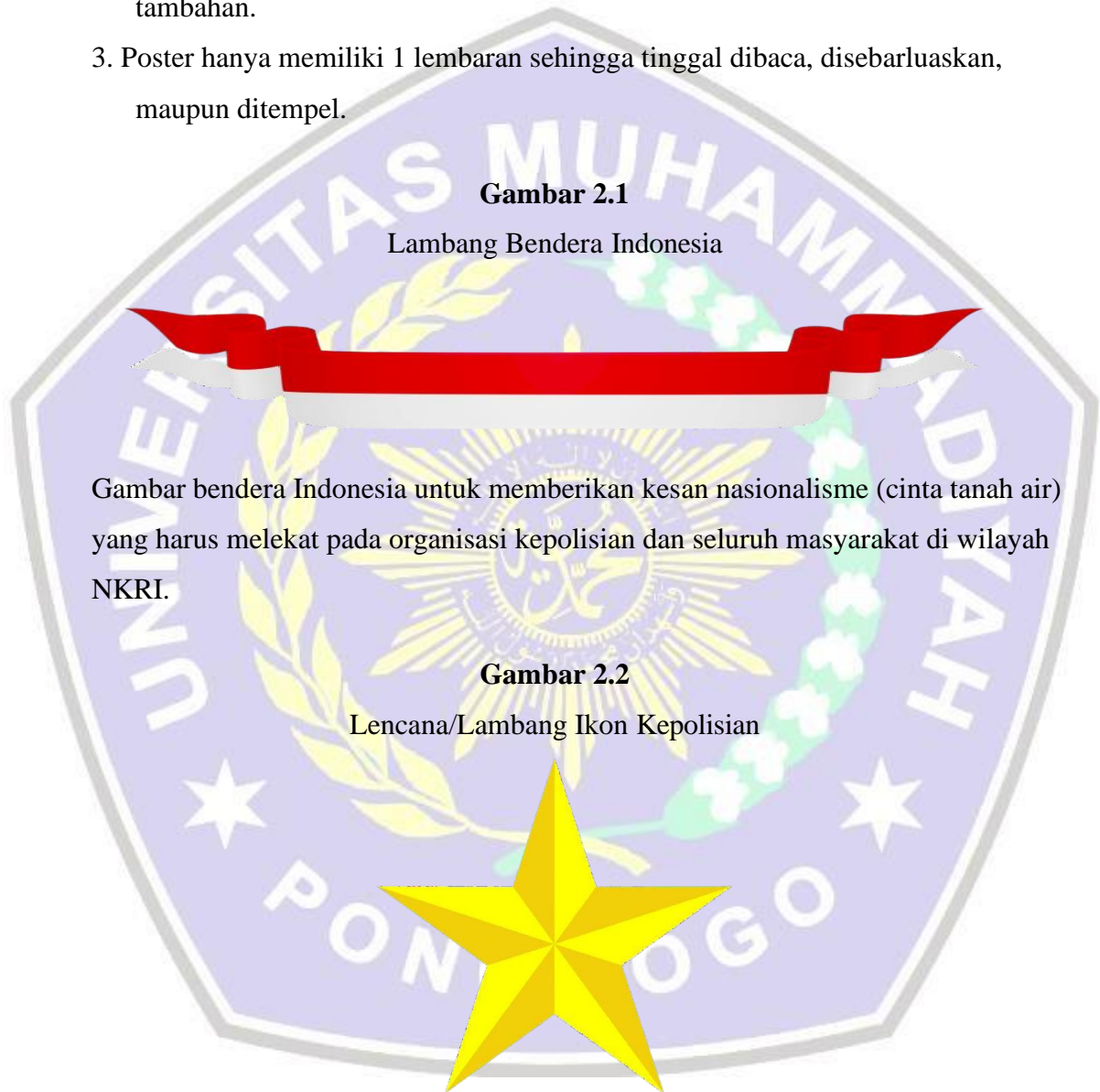
Cara Penggunaan

Penggunaan poster informatif radikalisme tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena sifatnya yang mudah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa ke berbagai tempat.

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu maupun kolektif.
2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanpa memerlukan praktik tambahan.
3. Poster hanya memiliki 1 lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, maupun ditempel.

Gambar 2.1

Lambang Bendera Indonesia



Gambar bendera Indonesia untuk memberikan kesan nasionalisme (cinta tanah air) yang harus melekat pada organisasi kepolisian dan seluruh masyarakat di wilayah NKRI.

Gambar 2.2

Lencana/Lambang Ikon Kepolisian

Walaupun tidak secara resmi, bintang merupakan lambang yang kerap dipakai untuk menunjukkan eksistensi aparat kepolisian bahkan di tingkat internasional. Penulis sengaja menambahkan lambang bintang agar supaya poster lebih mudah dikenali, maupun ditemukan karena tampilan warna yang mencolok dan lebih menarik.

Gambar 2.3

Ikon Tanda *Checklist*



Ceklis merupakan simbol untuk memberikan tanda keberhasilan maupun tujuan penargetan/capaian yang telah ditetapkan oleh aparat kepolisian selama masa penanganan radikalisme dan terus berlanjut hingga hari ini.

Gambar 2.4

Siluet Karikatur Radikal



Siluet karikatur Radikal tidak merujuk atau tendensi terhadap suatu kelompok maupun individu tertentu, namun lebih bersifat sebagai gambaran umum terhadap oknum yang berada di luar perilaku normal bahkan sampai bermodalkan senjata tajam, mengingat di Indonesia sendiri kondisi penyebaran paham radikal tidak ekstrim seperti negara-negara luar. Pemilihan warna siluet dalam poster informatif adalah wujud netral dari diri penulis supaya tidak terkesan menyinggung banyak pihak dan terjadi kesalahpahaman.

BAB III RENCANA HASIL

Validasi dan Revisi

Validasi

Tahap validasi poster informatif dilakukan oleh Dosen Penguji melalui kegiatan persidangan dengan cara penulis mempresentasikan tentang pola penanganan radikalisme oleh aparat kepolisian, setelah sebelumnya melalui tahap pembimbingan dan pengarahan dari Dosen Pembimbing untuk merubah beberapa konsep, *design*, bentuk, maupun pemilihan kata-kata untuk diaplikasikan dalam poster mentah (sebelum dicetak). Perbaikan dari dosen penguji secara tidak langsung mengurai kekurangan dari diri penulis dalam menyelesaikan *design* poster, terlebih lagi dengan pola dalam bentuk bagan yang memerlukan ketelitian lebih lanjut. Revisi dilakukan beberapa kali dengan orientasi penyederhanaan konsep, namun tidak mengurangi makna agar tersampaikan dengan efektif. Pada dasarnya proses revisi adalah memperjelas konsep melalui bagan sederhana, dengan isian berupa pola penanganan, hubungan koordinasi, serta elemen penargetan bagi aparat kepolisian ketika melakukan operasi.

Gambar 3.1
Proses Validasi (Persidangan)



Hasil HKI

Poster informatif radikalisme merupakan media informatif serta edukatif yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia terutama di tingkat daerah. Poster informatif radikalisme dapat dimanfaatkan oleh aparat kepolisian, atau pun dikembangkan bentuknya menjadi lebih menarik dari segi *design*. Menjelang tahun 2024 dalam ajang Pemilu, biasanya Indonesia selalu identik diwarnai dengan berbagai bentuk perlawanan maupun krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyelenggara pemilu, serta aparat kepolisian. Sehingga terkadang melahirkan bentuk perlawanan, kekerasan, dan aksi demonstrasi anarkis yang mana dapat mengancam integritas bangsa. Dengan adanya poster informatif radikalisme, seluruh elemen baik masyarakat, mahasiswa, siswa, dan lain sebagainya perlu berhati-hati untuk tidak mudah mengikuti gerakan-gerakan informal di luar prosedur kenegaraan.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Radikalisme merupakan gerakan atau paham yang perlu untuk selalu mendapat *monitoring* dari pihak pemerintah maupun aparat kepolisian sebagai elemen pelaksana tugas operasi lapangan. Potensi radikalisme di Indonesia bisa dibilang sangat rentan, terlebih lagi kondisi Indonesia dengan status negara berkembang yang sebagian besar penduduknya berada dalam kategori miskin. Dalam hal ini, kondisi kesehatan ekonomi dan mental seseorang merupakan pintu masuk yang sangat rentan untuk mudah dipengaruhi oleh berbagai jenis paham dengan sifat seperti: menginginkan adanya perubahan secara cepat, drastis, bahkan ekstrim. Terlebih lagi isu seputar agama yang sebenarnya penuh dengan kemuliaan, namun terkadang dijadikan referensi penguat bagi oknum tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Radikalisme paling ekstrim di Indonesia bukan hanya sebatas dalam ciri pemahaman semata, akan tetapi bisa dilihat dari berbagai kasus ke belakang seperti maraknya peledakan bom bunuh diri oleh oknum/individu dengan tujuan tidak jelas.

Maka dari itu pola penanganan radikalisme oleh aparat kepolisian di Indonesia adalah tergolong upaya preventif yang tepat dalam melakukan penyisiran dan pengamatan terhadap lingkungan strategis terpilih. Terutama terhadap generasi muda seperti siswa dan mahasiswa yang perlu untuk diarahkan supaya memiliki pemikiran ideal, dan tetap kritis untuk berkontribusi terhadap pembangunan masa depan Indonesia melalui berbagai cara-cara legal.

Kritik dan Saran

Penyusunan HKI oleh penulis bukan lah kebenaran mutlak yang harus dipaksakan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai acuan untuk dikembangkan, dibenahi, maupun ditingkatkan keberadaannya mengingat begitu besarnya sisi keterbatasan dalam diri penulis.